



Dua siswi di MIN 1 Sidoarjo memegang poster edukatif tentang bahaya sampah plastik dengan pesan untuk menjaga lingkungan, termasuk mengurangi pencemaran laut akibat plastik. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mewujudkan Lingkungan Belajar Setara, Inklusif, dan Adaptif Perubahan Iklim di Kabupaten Sidoarjo

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Sidoarjo: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Sidoarjo menguasai kemampuan dasar dengan cukup baik. Meski begitu, capaian tersebut bisa ditingkatkan lagi. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas lingkungan belajar, sehingga menjadi aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Sidoarjo meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (khususnya berbasis gender) di sekolah, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya kesadaran dan pengetahuan mengenai isu dan dampak perubahan iklim.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang responsif dan efektif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : 71,82

Numerasi : 59,31

Masing-masing skor tersebut lebih tinggi sekitar delapan poin dari nilai rata-rata provinsi. Meski begitu, capaian ini bisa berkembang lebih baik lagi.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, peningkatan hasil belajar murid dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas lingkungan belajar. Sekolah akan menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Sidoarjo, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Sidoarjo pada Desember 2024. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Sebanyak 101 kasus kekerasan terjadi pada anak di Kabupaten Sidoarjo—baik di rumah, sekolah, maupun fasilitas umum (Kementerian PPPA, 2024). Kasus itu berupa perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual, yang dilakukan antaranak atau oleh guru dan orang tua terhadap anak. Hal ini disebabkan masih adanya stereotip gender tradisional (kuat vs lemah) dan lemahnya pengawasan di sekolah.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 4.573 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 15% tidak sekolah dan 85% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusif (3%), sekolah inklusif (36%), atau sekolah luar biasa/SLB (46%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, murid di kelompok ini masih menemui sekolah dan madrasah yang menolak mereka ketika mendaftar, akses ke dan di sekolah yang jauh dari memadai, fasilitas yang belum menunjang kebutuhan belajar, serta guru yang belum memiliki kualifikasi khusus untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka.

Stigma sosial tentang disabilitas pun masih sangat kuat di masyarakat. Akibatnya, orang tua sering tidak menyekolahkan anak karena malu, merasa anak tidak akan mampu mempelajari ilmu apa pun, atau takut anak mengalami perundungan dan kekerasan.

Di sisi lain, masih banyak pula murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid di daerah terpencil, murid belum bisa berbahasa Indonesia, dan murid putus/tidak sekolah.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 97,64 dari 250. Angka tersebut lebih rendah dari indeks Jawa Timur (118,61) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Karena tidak rentan terhadap bencana, para pemangku kepentingan dan masyarakat belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan perubahan iklim, sehingga mereka belum mengubah perilaku menjadi lebih ramah lingkungan. Mereka masih membakar sampah, menggunakan styrofoam, dan tidak mendaur ulang plastik. Sekolah pun belum menerapkan kebiasaan ramah lingkungan dan pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Kemiskinan dan disabilitas

Kemiskinan menghambat akses anak penyandang disabilitas terhadap pendidikan karena keluarga tidak mampu membiayai perawatan kesehatan dan fasilitas pendukung.



Risiko daerah terpencil

Kondisi daerah terpencil menyulitkan anak menjangkau sekolah dan memiliki fasilitas belajar yang memadai. Mereka juga sulit menyesuaikan pembelajaran dengan bahasa Indonesia karena mayoritas baru bisa berbicara dengan bahasa daerah.



Perubahan iklim dan disabilitas

Anak penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling terdampak perubahan iklim, terutama saat terjadi banjir atau kebakaran.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan & Kantor Kementerian Agama: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan agar semakin responsif dan efektif

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
2. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas akan bekerja sama dengan TPPK untuk mengadvokasi pendidikan karakter dalam kurikulum, menerapkan tindakan disiplin positif yang relevan dengan perilaku murid, serta memperkuat sistem pelaporan kasus kekerasan di sekolah.
3. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi ekosistem pendidikan, sehingga penerapan kebijakan dan penyediaan layanan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bisa selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.



Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengupayakan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang akomodasi yang layak, sekaligus mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pendidikan inklusif. Langkah ini bertujuan menjamin pemenuhan hak pendidikan serta penyediaan akses dan fasilitas belajar yang layak bagi murid penyandang disabilitas.
2. Memperkuat kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten, salah satunya melalui peningkatan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan. Dengan begitu, murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
3. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Para siswa belajar secara kolaboratif melalui permainan edukatif untuk mengenal konsep perkalian.
©Tim Komunikasi INOVASI



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin dan daerah terpencil

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan secara langsung ke masyarakat, terutama murid dari keluarga miskin dan di daerah terpencil (seperti wilayah tambak atau rawa-rawa). Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mengaplikasikan kebijakan dan praktik baik perubahan iklim di tingkat nasional dan provinsi sebagai kebijakan, rencana, dan program kegiatan di tingkat kabupaten. Misalnya, integrasi pendidikan perubahan iklim ke kurikulum pendidikan, pelatihan guru yang relevan, rencana respons dan evakuasi bencana, serta praktik konservasi air dan energi. Hal ini dapat dilakukan melalui praktik pembuatan biopori, penjernihan air, atau penghematan listrik.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital, salah satunya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dan menstimulasi perubahan kebiasaan.